



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Tuanku Tambusai-Bagan Besar Telp. (0765) 440414 Fax. 440415
DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa kewajiban bagi Instansi Pemerintah untuk melakukan penilaian resiko;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Dumai Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang menyebutkan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko bertanggungjawab melakukan pengelolaan resiko di lingkup kerjanya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Penilaian Risiko Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebgaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 34 Seri E);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PENILAIAN RISIKO KEGIATAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

KESATU : Penetapan Penilaian Risiko Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai untuk Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi perhatian oleh seluruh ASN dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan Kegiatan Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 20 Desember 2024

a.n WALIKOTA DUMAI,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Dumai




Drs. BUDHI HASNUL.M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740213 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Walikota Dumai di Dumai (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Dumai di Dumai


Form 4
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai
Tahun Penilaian	: 2025
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber data	: RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026
Visi	Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu 3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas 4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik
Penetapan Konteks Misi Risiko Strategis Pemda	4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera 1.2 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah 2.1 Membangun masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera 3.1 Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan 3.2 Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non alam 4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi
Sasaran RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah 1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Dumai 1.1.3 Meningkatnya ketahanan pangan daerah 2.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai 2.1.2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kota Dumai 2.1.3 Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kota Dumai 2.1.4 Meningkatnya kebudayaan Melayu yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan 3.1.1 Meningkatnya infrastruktur kota 3.1.2 Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten 3.1.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah 4.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	<p>4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah</p> <p>Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>
IKU Sasaran RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun 3 Indeks Manajemen Resiko
Penetapan Konteks IKU Risiko Strategis Pemda	<p>1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah adalah suatu perhitungan nilai dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah</p>
Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 7. Program Penyelenggaraan Pengawasan 8. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi


Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan - Sekretariat Daerah 2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Perencanaan 3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan - Keuangan 4. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan - Inspektorat Daerah
Nama Dinas Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Daerah 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pendapatan Daerah 5. Inspektorat Daerah
Tujuan, Sasaran, IKU dan	<p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi <p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 4.1.1 Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah <p>IKU Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 <p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDI HASNUL, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19740213 199303 1 002</p>	

Form 5
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD


Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	:	2025	
Periode yang dinilai	:	Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	:	Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	:	Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai		
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional		
IKU Renstra OPD	IKU		2026
	1.	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) PEMDA (Konteks : untuk mengukur kualitas perencanaan daerah yang terdiri dari komponen sinergi perencanaan, kualitas perencanaan dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja)	100
	2.	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN (Komponen Sinergi)	9
	3.	Keselarasn dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP (Komponen Sinergi)	13
	4.	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD (Komponen Sinergi)	10
	5.	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD (Komponen Kualitas)	49
	6.	Inovasi perencanaan pembangunan (Konteks Kualitas)	9
	7.	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait (Komponen keterhubungan renbang dan renkin)	10
Program	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Stratgeis:		
		Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
	Sasaran Strategis:		
	1	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
	IKU Strategis:		
	1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) PEMDA	100
	2	Keselarasn dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	9
	3	Keselarasn dokumen RKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP	13
	4	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD	10
	5	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD	49
	6	Inovasi perencanaan pembangunan	9
	7	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	10

	Program :	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 <p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si Pembina Utama Muda NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.1
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1 Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional 2 Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas 3 Adanya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja 	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan: Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)</p>	
 <p>Dumai, 20 Februari 2024 Kepala Bappeda Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.2
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Publik</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik</p>	
 <p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213.199303.1.002</p>		

Form 6.3
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</p>	
 <p>Dumai, 20 12 2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.4
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	2.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</p>	
 <p>Dumai, 20-122024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.5
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1.1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 2.1.2 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2.1.4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	2.1.5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</p>	
<p>Dumai, 20-12-2024 Gubernur Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.6
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
Sub Kegiatan	2.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	2.2.1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program:</p> <p style="padding-left: 40px;">Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan:</p> <p style="padding-left: 40px;">Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <p style="padding-left: 40px;">Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p style="padding-left: 40px;">Jumlah Dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</p>	
 <p>Dumai, 20 12 2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP. 19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.7
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
Sub Kegiatan	2.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	2.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</p>	
 <p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.8
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	2.4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
Sub Kegiatan	2.4.1 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	2.4.1 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	
 <p>Dumai, 20 12 2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.9
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
	2 Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas	
	3 Adanya keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja	
Program (Renja 2025)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Kegiatan	3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
 <p>Dumai, 20-6-2024 a.n Waji Kota Dumai Kepala Bappeda Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.10
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p>	
<p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213.199303.1.002</p>		


Form 6.11
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</p>	
<p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP. 19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.12
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd) 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd) 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</p>	
 <p>Dumai, 10 12 2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213.199303.1.002</p>		

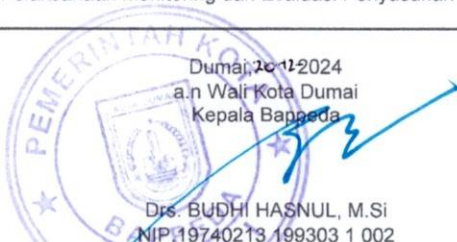
Form 6.13
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	
 <p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.14
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian : 2025	
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai : Bappeda Kota Dumai	
Sumber data : Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
	2025 1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p>
 <p>Dumai, 20-11-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>	

Form 6.15
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program:</p> <p style="padding-left: 40px;">Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan:</p> <p style="padding-left: 40px;">Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p style="padding-left: 40px;">Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan</p>	
<p>Dumai, 20 11 2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		

Form 6.16
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, 3.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.1.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan 3.1.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.1.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</p>	
<p>Dumai, 26-11-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.17
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p>	

Dumai, 20-12-2024
a.n Wali Kota Dumai
Kepala Bappeda

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002

Form 6.18
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p>	
 <p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213.199303 1 002</p>		

Form 6.19
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p>	
<p>Dumai, 20 11 2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		


Form 6.20
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
Keluaran Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</p>	<p>2025</p> <p>1 Laporan</p>
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</p>	

Dumai, 20-12-2024
a.n. Wali Kota Dumai
Kepala Bappeda

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002

Form 6.21
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD)</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya</p>	
<p>Dumai, 20 Februari 2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213.199303.1.002</p>		

Form 6.22
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</p>	
 <p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		

Form 6.23
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan</p>	

Dumai, 2012-2024

a.n Wali Kota Dumai
Kepala Bappeda

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002

Form 6.24
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	<ol style="list-style-type: none"> 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, 3.2.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.2.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.2.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD 3.2.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3.2.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko	3.2.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</p>	
<p>Dumai, 20-11-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		

Form 6.25
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD


Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir</p>	

Dumai, 20-12-2024
a.n Wali Kota Dumai
Kepala Bappeda




Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002


Form 6.26
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</p>	
 <p>Dumai, 20-2-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p> <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		

Form 6.27
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan</p>	
<p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		

Form 6.28
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</p>	
<p>Dumai, 20-1-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		

Form 6.29
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir</p>	

Dumai, 20-12-2024
a.n Wali Kota Dumai
Kepala Bappeda



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002

Form 6.30
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</p>	

Dumai, 20 April 2024
a.n Wali Kota Dumai
Kepala Bappeda

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002


Form 6.31
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Peencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Peencanaan</p>	

Dumai, 20-11-2024
a.n Wali Kota Dumai
Kepala Bappeda

Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002

Form 6.32
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Dumai	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
OPD yang dinilai	: Bappeda Kota Dumai	
Sumber data	: Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2025	
Tujuan Strategis	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai	
Sasaran Strategis	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	
Program (Renja 2025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 	
Penetapan Konteks Program Risiko Operasional OPD	3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	
Penetapan Konteks Kegiatan Risiko Operasional OPD	3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
Sub Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 3.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 3.3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 3.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, 3.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 	
Penetapan Konteks Subkegiatan Risiko Operasional OPD	3.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Keluaran Subkegiatan	2025
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</p>	
<p>Dumai, 20-12-2024 a.n Wali Kota Dumai Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. BUDHI HASNUL, M.Si NIP.19740213 199303 1 002</p>		

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai
 Nama OPD : Bappeda Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis: Meningkatkan Reformasi Birokrasi									
	Sasaran Strategis: Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan daerah	RSP.25.36.01.51	Walikota Dumai	1. Kualitas sumber daya aparatur yang menyusun perencanaan belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan (pengangkatan dan penempatan pejabat struktural dan fungsional di Bappedalitbang merupakan kewenangan dari Tim Baperjakat dan Kepala Daerah 2. Kebijakan pemerintah pusat yang sebelumnya tidak ada di dokumen pusat namun muncul sebagai respon atas suatu kejadian/kondisi diluar kebiasaan yang mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian-penyesuaian ketika menyusun dokumen perencanaan tahunan daerah	Internal	C UC	1. Kurangnya nilai unsur perencanaan pada penilaian SAKIP 2. Tidak konsistennya dokumen perencanaan tahunan yang mengakomodir kebijakan pusat yang baru sebagai mandat yang harus dilaksanakan dengan penjabaran dokumen RPJMD daerah	Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.25.36.01.52	Walikota Dumai	1. Terlambatnya penerbitan pedoman penyusunan RKPD oleh Kemendagri 2. Proses fasilitasi RKPD di Provinsi terlambat	Eksternal	UC	Keterlambatan proses tahapan APBD	Pemerintah Kota Dumai
			Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.25.36.01.53	Walikota Dumai	Kurangnya komitmen pimpinan Eselon 2 dan pembekalan manajemen kinerja bagi eselon 2	Internal	C	Rendahnya pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMD	Walikota



 Dumai, 20-12-2024
 Kepala Bappeda,
 Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19740213 199303 1 002

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor unit
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan **C jika unit kerja mampu mengendalikn penyebab risiko**, atau **UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikn risiko**
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

KERTAS KERJA
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai										
No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan OPD: Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai									
1	Sasaran OPD: Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Propinsi Riau dan Nasional	Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN Keselarasan dokumen RRRKPD Kota Dumai dengan dokumen RKP Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD Inovasi perencanaan pembangunan Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait								
1.	Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) PEMDA Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/ Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD	Adanya perubahan regulasi/kebijakan terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD atau RKPD	RSO.25.36.28.01	Kepala Bappeda	1. Adanya perubahan regulasi/kebijakan yang menyebabkan perubahan pada target di RPJMD/RKPD	Eksternal	UC	Tidak selaras antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD	Pemerintah Kota Dumai

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
			Tidak selaras antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPd	RSO.25.36.28.02	Kepala Bappeda	2. Kurangnya monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target program/kegiatan	Internal	C	Tidak tercapainya target program/kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama	Pemerintah Kota Dumai	
			Dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak sinkron dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	RSO.25.36.28.03	Kepala Bappeda	3. kurangnya sosialisasi dan koordinasi antara Bappeda dengan perangkat daerah terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun Bappeda	Eksternal	C	Terjadinya kesalahan dalam menentukan target/kebijakan.	Pemerintah Kota Dumai	
			Proses perencanaan pembangunan kurang berkembang	RSO.25.36.28.04	Kepala Bappeda	4. Data yang disajikan belum tervalidasi	Eksternal	C	Kurang berkembangnya metode yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan baik faktor pemanfaatan teknologi maupun metode inovatif lainnya	Pemerintah Kota Dumai	
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi perencanaan pembangunan Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.25.36.28.05	Kepala Bappeda	Keterlambatan Perangkat Daerah menyampaikan data; Belum tersedianya regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan data	Eksternal	C	Jadwal penyusunan penganggaran menjadi terhambat	Pemerintah Kota Dumai	
			Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.25.36.28.06	Kepala Bappeda	Keterlambatan Perangkat Daerah menyampaikan data; Belum tersedianya regulasi yang mengatur terkait sanksi bagi Perangkat Daerah yang terlambat menyampaikan data	Eksternal	UC	Jadwal penyusunan penganggaran menjadi terhambat	Pemerintah Kota Dumai	
			Keselarasn dokumen RKPd Kota Dumai dengan dokumen RKP			Belum memiliki database time series yang tersimpan kedalam sistem e-planning (Sebelum ada SIPD)	Eksternal	UC			

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/JUC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD	Target capaian program prioritas Nasional dalam RKPD Kota Dumai tidak tercapai	RSO.25.36.28.07	Kepala Bappeda	Terbatasnya APBD Kota Dumai	Eksternal	UC	Penganggaran tidak tepat sasaran sesuai dengan prioritas Nasional	Pemerintah Kota Dumai
		Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.25.36.28.08	Kepala Bappeda	Kurang konsistennya Perangkat daerah dalam penganggaran program prioritas Nasional	Eksternal	C	Penyusunan dokumen Peencanaan tidak sesuai jadwal	Bappeda



Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja utama
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e diisi dengan kode risiko
- Kolom f diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g diisi dengan penyebab imbuhnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i diisi dengan **C jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko**
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Dumai, **20-12-2024**

Pemilik Risiko :

1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SAILI,ST
NIP.19870929 201001 1 006
3. HUMANDA DWIPA PUTRA, SH
NIP.19840419 200904 1 001

(*g*)
(*h*)
(*k*)

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirraan					Sebab		C/UC	Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Uraian	Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
5	Sub Kegiatan: Koordinas Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Perencanaan										
			Pelaksanaan	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	ROO.25.36.28.12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terbatasnya Sumber Daya Manusia Penyusunan Dokumen Perencanaan	Internal Eksternal	Dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal		Pemerintah Kota Dumai		
				Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	ROO.25.36.28.13	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterbatasan data/dokumen referensi	Internal	C				
				Terhambatnya perjanjian kerjasama	ROO.25.36.28.14 KM	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Masa MOU yang sudah berakhir	Internal Eksternal	C/UC				
6	Sub Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Pemantauan dan Evaluasi										
			Pelaporan dan Pertanggung Jawaban										
			Perencanaan										
			Pelaksanaan	Interpretasi Data yang Tidak Tepat	ROO.25.36.28.15	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam analisis data atau ketidaksiesuaian metode analisis dengan jenis data yang dianalisis.	Internal	C	Kesalahan interpretasi bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang salah arah, mengakibatkan ketidakefektifan pelaksanaan program pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai		
	Ketidakakuratan Data	ROO.25.36.28.16	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemutahiran data yang tidak konsisten	Internal Eksternal	C	Hasil analisis data kurang akurat	Pemerintah Kota Dumai					

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan					Sebab		CIUC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
8	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Perencanaan	Kurangnya Keterampilan Teknis Pengguna	ROO 25.36.28.21	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terbatasnya pelatihan teknis untuk pegawai dalam memahami dan mengoperasikan SIPD.	Internal Eksternal	C	Pegawai mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem, yang berdampak pada ketidakefektifan dalam pengelolaan informasi daerah dan keterlambatan dalam proses administrasi	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan Evaluasi									
			Pelaporan dan Pertanggung Jawaban									
	Program: Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah											
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											
9	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP, JPD, RP, JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, JPD, RP, JMD dan RKPD)	Perencanaan	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO 25.36.28.22 KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan daerah pembangunan (RP, JPD, RP, JMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO 25.36.28.23 KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RP, JPD, RP, JMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	
				Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO 25.36.28.24 KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan anggaran dan kendala sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan stakeholder yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan	
			Pemantauan dan evaluasi	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO 25.36.28.25 KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyampaian dokumen Renja yang tidak tepat waktu	Eksternal	UC	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RP, JPD, RP, JMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan	
							Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	Eksternal	C	belum tersampainya informasi ke pejabat di PD	Stakeholder	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirraan					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
10	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaporan dan pertanggung jawaban	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid. pemerintahan yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.28 KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Belum sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Belum maksimalnya OPD bid. Pemerintahan dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.27 KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai Kualitas pelaksanaan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum optimal	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai Stakeholder	
			Pemantauan dan evaluasi	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.28 KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf yang tidak sesuai bidangnya	Eksternal	C	belum tersampainya informasi ke pejabat di PD	Stakeholder	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirraan					Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
13	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP-JPD, RP-JMD dan RKPD)	Perencanaan	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD bid. Pembangunan manusia dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.25.36.28.35.KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	Terlambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RP-JPD/RP-JMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.25.36.28.36.KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Letihnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalibang dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RP-JPD/RP-JMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	
				Adanya aspirasi masyarakat dan hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.37.KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	UC	Tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder Pembangunan	
							Penyampaian dokumen Renja yang tidak tepat waktu	eksternal	UC	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RP-JPD/RP-JMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan	
			Pemantauan dan evaluasi	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.38.KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	Eksternal	C	Belum tersampainya informasi ke pejabat di PD	Stakeholder	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
			Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid. pembangunan manusia yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.39.KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Belum maksimalnya OPD bid. pembangunan manusia dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.40.KM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan kemampuan SDM yang menanganai perencanaan di OPD	eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai Kualitas pelaksanaan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum optimal	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai Stakeholder	
			Pemantauan dan evaluasi									
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									

Sub Kegiatan:

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemiripan					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
17	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian	ROO.25.36.28.46.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang perekonomian	ROO.25.36.28.47.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	
18	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi (bidang Perekonomian)	ROO.25.36.28.48.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Dokumen perencanaan	ROO.25.36.28.49	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkannya ke bendahara administrasi ke bendahara bidang	Internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai	
18	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Dokumen perencanaan	ROO.25.36.28.50.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.51.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan					Sebab		Dampak		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
19	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Adanya ketidaksihinggaan waktu dalam pengumpulan dokumen perencanaan (bidang Perekonomian)	ROO 25.36.28.52.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keitidaksihinggaan Perangkat Daerah selaku mitra	eksternal	C	Peretapan Renja terlambat Waktu pemeriksaan dokumen perencanaan oleh subkoordinator berkurang	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai		
			Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi (bidang Perekonomian)	ROO 25.36.28.53	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai		
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
			Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO 25.36.28.54	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	C	menghambat pelaksanaan survey	Bappeda		
20	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RRP/JMD pada Bidang Perekonomian	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO 25.36.28.55	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi dengan mitra bidang Perekonomian	internal dan eksternal	C	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda		
			Proses pencairan yang lambat (bid. perekonomian) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO 25.36.28.56	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai		
			Penyelesaian laporan monitoring yang lama (bid. perekonomian)	ROO 25.36.28.57	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Pengerjaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	internal	C	Proses pengarsipan bermasalah	Pemerintah Kota Dumai		
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
20	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RRP/JMD pada Bidang Perekonomian	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 25.36.28.58.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang Perekonomian belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai		
			Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO 25.36.28.59.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai		

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemiripan					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
				Jadwal pelaksanaan pengadaan/seleksi (bid. perekonomian) mundur	ROO.25.36.28.60	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Belum siap/lempang dokumen pengadaan	Eksternal	UC	Pengadaan jasa konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai jadwal	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi (bid. perekonomian)	ROO.25.36.28.61	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
21	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang SDA	ROO.25.36.28.62 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang SDA	ROO.25.36.28.63 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Adanya aspirasi masyarakat dan hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.64 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	UC	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban	Proses pencairan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi (bid. SDA)	ROO.25.36.28.65	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai	
22	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.66 KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemirraan					Sebab		C/UC	Dampak				
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)	Uraian		Pihak yang terkena				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
23	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan	Kurang seriusnya OPD (bid SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO 25.36.28.67.KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	eksternal	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	C	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai				
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat (bid. SDA)diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi.	ROO 25.36.28.68	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk			Pemerintah Kota Dumai			
			Pelaporan dan pertanggung jawaban												
			Perencanaan	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO 25.36.28.69	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	internal dan eksternal	menghambat pelaksanaan survey			Bappeda			
24	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP-JMD pada Bidang SDA	Pelaksanaan	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO 25.36.28.70	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang SDA	internal dan eksternal	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	C	Bappeda				
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat (bid. SDA) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO 25.36.28.71	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	internal	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk			Pemerintah Kota Dumai			
			Pelaporan dan pertanggung jawaban	Penyelesaian laporan monitoring yang lama (bid. SDA)	ROO 25.36.28.72	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Pengenaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	internal	Proses pengarsipan bermasalah			Pemerintah Kota Dumai			
			Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. SDA) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 25.36.28.73.KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional			Pemerintah Kota Dumai			

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemiraaan					Sebab			Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. SDA) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO.25.36.28.74 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	Internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Proses pencairan yang lambat (bid. SDA) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.75	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	Internal	C	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											
25	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.76 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Internal dan Eksternal	C	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.77 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	Internal dan Eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.78 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Internal dan Eksternal	C	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemerintah Kota Dumai dan Stakeholder pembangunan	
			Pemantauan dan evaluasi	Masih terdapatnya perangkat daerah tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang infrastruktur	ROO.25.36.28.79 KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	eksternal	C	tidak dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran	Pemerintah Kota Dumai	
			Pelaporan dan pertanggung jawaban									
26	Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Perencanaan	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.80KM	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Internal dan eksternal	C	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	Bappeda dan Pemerintah Kota Dumai	

No	Tugas/ Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemiripan					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/ Internal)	Uraian		Pihak yang terkena	
a	Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
28		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Perencanaan RKP/DP/IR/MD pada Bidang Infrastruktur	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.87.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai	
			Peleaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.88.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.89.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perubahan standar harga satuan	eksternal	C	Belum konsistennya dokumen Renstra/renja dengan RKP/DP/IR/MD	Pemerintah Kota Dumai	
			Peleaporan dan pertanggung jawaban									
29	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP/JP, RP/JMD dan RKPD)	Perencanaan	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan (bid. Kewilayahan)	ROO.25.36.28.90.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	internal dan eksternal	C	terlambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah	Pemko Dumai	
			Peleaksanaan	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RP/JP/IR/MD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.91.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	internal dan eksternal	C	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RP/JP/IR/MD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	Pemko Dumai	
			Pemantauan dan evaluasi	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.92.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	internal dan eksternal	C	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	Pemko Dumai dan Stake Holder Pembangunan	
			Peleaporan dan pertanggung jawaban	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.25.36.28.93.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	internal dan eksternal	C	tidak dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran	Pemerintah Kota Dumai	

No	Tujuan/ Sasaran Strategi/Program	Indikator Kinerja	Risiko Operasional/Risiko Fraud/Risiko Kemitraan				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber (Eksternal/Internal)		Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/DP/IR/MD pada Bidang	Perencanaan	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 25.36.28.102.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	internal dan eksternal	C	tidak diakomodirnya usulan pemertihan Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaksanaan	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan)	ROO 25.36.28.103.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	internal dan eksternal	C	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	Pemerintah Kota Dumai
			Pemantauan dan evaluasi	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO 25.36.28.104.KM	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perubahan standar harga satuan	eksternal	UC	Belum konsistennya dokumen Renstra/renja dengan RKP/DP/IR/MD	Pemerintah Kota Dumai
			Pelaporan dan pertanggung jawaban								

Dumai, 20 - 12 - 2024
 Pemilik Risiko :
 1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
 NIP.19770405 200112 2 003
 2. INSANI TAQWA SAILI,ST
 NIP.19870929 201001 1 006
 3. HUMANDA DWIPA PUTRA, SH
 NIP.19840419 200904 1 001

Mengenal
 Kepala Bidang
 Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
 NIP.19740213 198303 1 002



Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor unit
- Kolom b diisi dengan tujuan sebagaimana tercantum dalam Renstra
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan kode risiko
- Kolom g diisi dengan pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : **Man, Money, Method, Machine, dan Material**
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C jika unit kerja mampu mengendalikan risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: **Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum**
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO

No.	Nama Pemda : Pemerintah Kota Dumai Tahun Penilaian : 2025 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan)	Risiko yang Teridentifikasi b	Kode Risiko c	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
				Skala Dampak d	Skala Kemungkinan e	Skala Risiko f	Uraian g	Celah Pengendalian h	Skala Dampak* i	Skala Kemungkinan *) j	Skala Risiko k		
I. Risiko Strategis Pemda													
1		Rendahnya kualitas dokumen perencanaan daerah	RSP.25.36.01.51	4	4	19	Mengadakan bimbingan teknis, dan dikat mengenai perencanaan pembangunan daerah kepada pegawai	Terdapat Pegawai yang kurang fokus dalam menyusun dokumen perencanaan karena banyaknya beban kerjanya	4	2	13	V	
2		Keterlambatan penetapan RKPD	RSP.25.36.01.52	3	4	16	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan sebelum melakukan penyelesaian dokumen rencana tahunan	Adanya kebijakan pemerintah pusat yang baru muncul setelah melakukan penyesuaian rencana tahunan	3	1	5		
3		Cascading eselon 2 belum mendukung pemda secara komprehensif	RSP.25.36.01.53	4	3	17	Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada OPD dalam menyusun cascading agar selaras dengan RPJMD	Belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh Blappeda kepada OPD	3	1	5		
II. Risiko Strategis OPD													
1		Adanya perubahan regulasi/kebijakan terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD atau RKPD	RSO.25.36.28.01	4	4	19			4	4	19	V	
2		Tidak selaras antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD	RSO.25.36.28.02	4	2	13			4	2	13	V	
3		Dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak sinkron dengan dokumen perencanaan perangkat daerah	RSO.25.36.28.03	4	2	13	Menegaskan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat Kepala Daerah untuk menindaklanjuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	Masih banyak nya Kepala perangkat daerah yang lalai dalam meminajuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	4	1	8		
4		Proses perencanaan pembangunan kurang berkembang	RSO.25.36.28.04	3	3	14			3	3	14	V	
5		Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.25.36.28.05	3	2	11			3	2	11		
6		Penyampaian dokumen perencanaan ke Provinsi tidak tepat waktu	RSO.25.36.28.06	3	2	11	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama pihak provinsi dan inspektorat	adanya kendala sistem SIPD	3	1	5		
7		Target capaian program prioritas Nasional dalam RKPD Kota Dumai tidak tercapai	RSO.25.36.28.07	4	1	8			4	1	8		

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (si dengan ceklist)
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
8.	Dokumen perencanaan perangkat daerah tidak sinkron	RSO.25.36.28.08	3	2	11	Mengajukan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui surat Kepala Daerah untuk menindaklanjuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	Masih banyak nya Kepala perangkat daerah yang lalai dalam menindaklanjuti hasil asistensi dan koordinasi terkait perencanaan perangkat daerah	3	1	5		
III. Risiko Operasional OPD												
1.	Belum sinkronnya dokumen Rancangan Awa dengan Dokumen Rancangan Pembangunan lainnya	ROO.25.36.28.01	4	4	19			4	4	19		
2.	Data Pendukung penyusunan Rancangan Awal belum lengkap	ROO.25.36.28.02	4	4	19			4	4	19		
3.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.03 KM	4	4	19			4	4	19		
4.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.04 KM	4	4	19			4	4	19		
5.	Rancangan Awal Hasil Konsultasi Publik tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.05 KM	4	4	19			4	4	19		
6.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.06 KM	4	4	19			4	4	19		
7.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.07 KM	4	4	19			4	4	19		
8.	Masukan dan Saran Hasil Forum Lintas Perangkat Daerah tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.08 KM	4	4	19			4	4	19		
9.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.09 KM	4	4	19			4	4	19		
10.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.10 KM	4	4	19			4	4	19		
11.	Penyempurnaan Rancangan Hasil Musrenbang tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.11 KM	4	4	19			4	4	19		
12.	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	ROO.25.36.28.12	4	4	19			4	4	19		
13.	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	ROO.25.36.28.13	4	4	19			4	4	19		
14.	Terhambatnya perjanjian kerjasama	ROO.25.36.28.14 KM	4	4	19			4	4	19		
15.	Interpretasi Data yang Tidak Tepat	ROO.25.36.28.15	4	3	17			4	3	17		
16.	Ketidaktepatan Data	ROO.25.36.28.16	4	3	17			4	3	17		
17.	Belum efektifnya proses pengolahan data	ROO.25.36.28.17	4	3	17			4	3	17		
18.	Belum efektifnya proses penyusunan Laporan-Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	ROO.25.36.28.18	4	3	17			4	3	17		
19.	Data yang disampaikan tidak akurat	ROO.25.36.28.19	4	3	17			4	3	17		

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak(*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
20	Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja peangkat daerah tidak tepat waktu	ROO.25.36.28.20.KM	4	3	17			4	3	17	✓	
21	Kurangnya Keterampilan Teknis Pengguna	ROO.25.36.28.21	4	3	17			4	3	17	✓	
22	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD (bid pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.25.36.28.22.KM	3	4	16			3	4	16	✓	
23	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RP-JD/RP-JMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.25.36.28.23.KM	3	3	14			3	3	14	✓	
24	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.24.KM	3	3	14			3	3	14	✓	
25	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.25.KM	3	3	14	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Masih adanya hasil pembahasan dan berita acara pembahasan yang belum sampai kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	3	2	11		
26	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid pemerintahan yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.26.KM	3	4	16			3	4	16	✓	
27	Belum maksimalnya OPD bid. Pemerintahan dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.27.KM	3	3	14			3	3	14	✓	
28	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.28.KM	3	4	16	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Masih adanya hasil pembahasan dan berita acara pembahasan yang belum sampai kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	3	3	14	✓	
29	Data bid. Pemerintahan yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.29	3	3	14			3	3	14	✓	
30	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.25.36.28.30.KM	3	4	16			3	4	16	✓	
31	Belum sinkronnya dokumen perencanaan OPD bid. Pemerintahan dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.31.KM	3	4	16			3	4	16	✓	
32	Belum maksimal program-program pemerintah pusat yang harus dijalankan di Kota Dumai	ROO.25.36.28.32.KM	3	3	14			3	3	14	✓	
33	Adanya prioritas pembangunan bid. Pemerintahan propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai yang belum terakomodir	ROO.25.36.28.33.KM	3	3	14			3	3	14	✓	
34	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.34.KM	3	4	16	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Masih adanya hasil pembahasan dan berita acara pembahasan yang belum sampai kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	3	3	14	✓	
35	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD bid. Pembangunan manusia dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.25.36.28.35.KM	3	4	16			3	4	16	✓	
36	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RP-JD/RP-JMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.25.36.28.36.KM	3	3	14			3	3	14	✓	
37	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.37.KM	3	3	14			3	3	14	✓	

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak ^{*)}	Skala Kemungkinan ^{*)}	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
38.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.38.KM	3	4	16	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Masih adanya hasil pembahasan dan berita acara pembahasan yang belum sampai kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	3	3	14	V	
39.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid. pembangunan manusia yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.39.KM	3	4	16			3	4	16	V	
40.	Belum maksimalnya OPD bid. pembangunan manusia dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.40.KM	3	4	16			3	4	16	V	
41.	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.41	3	3	14			3	3	14	V	
42.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.25.36.28.42	3	4	16			3	4	16	V	
43.	Belum sinkronnya dokumen perencanaan OPD bid. Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan Kota Dumal, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.43.KM	3	3	14			3	3	14	V	
44.	Belum maksimal program-program pemerintah pusat yang harus dijalankan di Kota Dumal	ROO.25.36.28.44.KM	3	3	14			3	3	14	V	
45.	Adanya prioritas pembangunan bid. Pembangunan Manusia propinsi/nasional yang berkecuali di Kota Dumal yang belum terakomodir	ROO.25.36.28.45.KM	4	2	13			4	2	13	V	
46.	Tidak sinkronnya antar Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian	ROO.25.36.28.46.KM	4	4	19		Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	4	3	17	V	
47.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RP.INDIRKPD) bidang perekonomian	ROO.25.36.28.47.KM	4	4	19		Masih adanya Perangkat Daerah yang kurang mengikuti arahan hasil dari koordinasi dan koordinasi dengan Bappeda	4	3	17	V	
48.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musunbang dan resea anggota DPRD (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.48.KM	2	3	10			2	3	10		
49.	Proses pencatatan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi (bidang Perekonomian)	ROO.25.36.28.49	3	2	11			3	2	11		
50.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. perekonomian) yang belum terakomodir dalam Dokumen perencanaan	ROO.25.36.28.50.KM	3	3	14		Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	3	2	11		
51.	Kurang sejujurnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.51.KM	3	3	14			3	3	14	V	
52.	Adanya ketidakpastian waktu dalam pengumpulan dokumen perencanaan (bidang Perekonomian)	ROO.25.36.28.52.KM	3	2	11			3	2	11		
53.	Proses pencatatan yang lambat diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi (bidang Perekonomian)	ROO.25.36.28.53	3	2	11			3	2	11		
54.	Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.54	3	3	14			3	3	14	V	
55.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO.25.36.28.55	3	4	16			3	4	16	V	

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Uraian	Celah Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
76.	Proses pencapaian yang lambat (bid. SDA) diabaikan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.77	3	2	11				2	11		
77.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.78 KM	4	4	19				4	19	√	
78.	Tidak terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.79 KM	4	3	17				3	17	√	
79.	Adanya aspirasi masyarakat dan hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.80 KM	3	3	14				3	14	√	
80.	Masih terdapatnya perangkat daerah tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang infrastruktur	ROO.25.36.28.81 KM	3	2	11				2	11		
81.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.82 KM	4	3	17				3	17	√	
82.	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.83 KM	3	3	14				3	14	√	
83.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur	ROO.25.36.28.85	3	3	14				3	14	√	
84.	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.86 KM	3	4	16				4	16	√	
85.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO.25.36.28.87 KM	3	3	14				3	14	√	
86.	Tidak tersedianya data (bid. Infrastruktur) pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah	ROO.25.36.28.88 KM	3	3	14				3	14	√	
87.	Double pencapaian perjalanan dinas dalam kota (bid. Infrastruktur) dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.25.36.28.89	3	2	11				2	11		
88.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.90 KM	4	4	19				4	19	√	
89.	Tidak terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.91 KM	4	3	17		Bidang Infrastruktur lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	2	13	√	
90.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.92 KM	4	4	19				4	19	√	
91.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.93 KM	4	4	19				4	19	√	
92.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan (bid. Kewilayahan)	ROO.25.36.28.94 KM	4	4	19				4	19	√	
93.	Tidak terkoordinasinya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.95 KM	4	4	19				4	19	√	
94.	Adanya aspirasi masyarakat dan hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.96 KM	3	3	14				3	14	√	
95.	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.97 KM	4	4	19				4	19	√	
96.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.98 KM	3	3	14				3	14	√	

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Nilai Inherent Risk			Existing Control / Pengendalian yang ada			Nilai Residual Risk			Penentuan Prioritas Risiko (isi dengan ceklist)
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko	Uraian	Celak Pengendalian	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
97.	Kurang seluruhnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.99 KM	3	3	14			3	3	14	V	
98	Kebutuhan data (bid. Kewilayahan) terkait pengembangan kewilayahan terdama di sektor pertubangan, kebencanaan, komunikasi dan informatika serta pengadaan barang dan jasa belum up to date sehingga perlu disempatkan	ROO.25.36.28.101 KM	4	3	17			4	3	17	V	
99.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi (bid. Kewilayahan) terhadap Perangkat Daerah mitra bidang kewilayahan	ROO.25.36.28.102	3	2	11			3	2	11		
100.	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.103	3	3	14			3	3	14	V	
101.	Waktu pelaksanaan monitoring (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.25.36.28.104	3	3	14			3	3	14	V	
102.	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah bid. Kewilayahan	ROO.25.36.28.105 KM	4	3	17			4	3	17	V	
103.	Double pencatatan perjalanan dinas (bid. Kewilayahan) dalam kota dalam rangka monitoring dengan perjalanan dinas dalam rangka penugasan lainnya di waktu yang bersamaan.	ROO.25.36.28.106	3	2	11			3	2	11		
104.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.107 KM	4	4	19			4	4	19	V	
105.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO.25.36.28.108 KM	4	4	19			4	4	19	V	
106.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.110 KM	4	3	17			4	3	17	V	

Dumai, 20-12-2024
 Pemilik Risiko :
 1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
 NIP.19770405 200112 2 003
 2. INSANI TAQWA SAILI,ST
 NIP.19870929 201001 1 006
 3. HUMANDA DWIPA PUTRA, SH
 NIP.19840419 200904 1 001

()
 ()
 ()



Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta CSA/FGD
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta CSA/FGD
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
2.	Proses perencanaan pembangunan kurang berkembang	RSO.25.36.28.04	14	Kepala Bappeda	Kurang kreativitas dan inovasi dari SDM yang melaksanakan perencanaan pembangunan	Kurang berkembangnya metode yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan baik faktor pemanfaatan teknologi maupun metode inovatif lainnya
3.	Tidak selaras antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD	RSO.25.36.28.02	13	Kepala Bappeda	Kurang monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target program/kegiatan	Tidak tercapainya target program/kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama
III.						
1.	Belum sinkronnya dokumen Rancangan Awal dengan Dokumen Rancangan Pembangunan lainnya	ROO.25.36.28.01	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum terkoordinasinya dokumen Rancangan Awal dengan Dokumen Rancangan Pembangunan lainnya	Dokumen Rancangan Awal belum dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah
2.	Data Pendukung penyusunan Rancangan Awal belum lengkap	ROO.25.36.28.02	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterlambatan Penyampaian Data Pendukung Perangkat Daerah dari bidang mitra	Penyusunan Dokumen Rancangan Awal tidak sesuai jadwal
3.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.03.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peserta yang tidak hadir /Kurangnya partisipasi masyarakat	Proses Penyampaian masukan penyempurnaan rancangan awal belum tercapai
4.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.04.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peserta yang hadir belum mewakili/memahami permasalahan kebutuhan pembangunan	Proses Penyampaian masukan penyempurnaan rancangan awal belum tercapai

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
5.	Rancangan Awal Hasil Konsultasi Publik tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.05.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum terintegrasi dokumen Rancangan Awal hasil Konsultasi Publik dengan Provinsi	Belum selarasnya dokumen Rancangan Awal hasil Konsultasi Publik dengan Provinsi
6.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.06.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peserta yang tidak hadir /Kurangnya partisipasi masyarakat	Proses Penyampaian masukan penyempurnaan Dokumen Rancangan belum tercapai
7.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.07.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peserta yang hadir belum mewakili/memahami permasalahan kebutuhan pembangunan	Proses Penyampaian masukan penyempurnaan Dokumen Rancangan belum tercapai
8.	Masukan dan Saran Hasil Forum Lintas Perangkat Daerah tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.08.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum terkoordinasikannya hasil Forum Lintas Perangkat Daerah dengan Provinsi	Proses Penyampaian masukan penyempurnaan Dokumen Rancangan belum tercapai
9.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.09.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peserta yang tidak hadir /Kurangnya partisipasi masyarakat	Proses Penyampaian masukan penyempurnaan rancangan hasil musrenbang belum tercapai
10.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.10.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peserta yang hadir belum mewakili/memahami permasalahan kebutuhan pembangunan	Proses Penyampaian masukan penyempurnaan rancangan hasil musrenbang belum tercapai
11.	Penyempurnaan Rancangan Hasil Musrenbang tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.11.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum terintegrasi dokumen Rancangan Hasil Musrenbang dengan Provinsi	Belum selarasnya dokumen Rancangan Hasil Musrenbang dengan Provinsi
12.	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	ROO.25.36.28.12	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terbatasnya Sumber Daya Manusia Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal
13.	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	ROO.25.36.28.13	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterbatasan data/dokumen referensi	Dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal
14.	Terhambatnya perjanjian kerjasama	ROO.25.36.28.14.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Masa MOU yang sudah berakhir	Dokumen Perencanaan tidak sesuai jadwal
15.	Proses pencairan yang lambat (bid. perekonomian) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.56	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
16.	Proses pencairan yang lambat (bid. SDA)diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.69	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk
17.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. SDA) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.74.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
18.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. SDA) propinsi/nasional yang berokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.75.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
19.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.76.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah
20.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.78.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah
21.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.90.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang Infrastruktur belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
22.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.92.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
23.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.93.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perubahan standar harga satuan	Belum konsistennya dokumen Renstra/renja dengan RKPJ/RPJMD
24.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan (bid. Kewilayahan)	ROO.25.36.28.94.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah
25.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.95.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai
26.	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.25.36.28.97.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	perangkat daerah belum mampu menyediakan data sesuai kemampuan	tidak dapat merencanakan sesuai dengan kebutuhan yang tepat sasaran
27.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.107.KM	19	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
28.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.108.KM	19	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangny koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
29.	Interpretasi Data yang Tidak Tepat	ROO.25.36.28.15	17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam analisis data atau ketidaksesuaian metode analisis dengan jenis data yang dianalisis.	Kesalahan interpretasi bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang salah arah, mengakibatkan tidak efektifitas pelaksanaan program pembangunan daerah
30.	Ketidakakuratan Data	ROO.25.36.28.16	17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemutahiran data yang tidak konsisten	Hasil analisis data kurang akurat
31.	Belum efektifnya proses pengolahan data	ROO.25.36.28.17	17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum tersedianya Tim Analisis Data dan Informasi	Hasil analisis data kurang akurat
32.	Belum efektifnya proses penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	ROO.25.36.28.18	17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Belum tersedianya Tim Penyusun Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan tidak terukur secara akurat
33.	Data yang disampaikan tidak akurat	ROO.25.36.28.19	17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kesalahan dalam penginputan realisasi fisik dan keuangan Rendahnya Tingkat pemahaman ASN dalam melaksanakan Monev	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan tidak terukur secara akurat
34.	Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak tepat waktu	ROO.25.36.28.20.KM	17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah terlambat menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan	Keterlambatan dalam penyampaian laporan Monev ke Provinsi
35.	Kurangny Keterampilan Teknis Pengguna	ROO.25.36.28.21	17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terbatasnya pelatihan teknis untuk pegawai dalam memahami dan mengoperasikan SIPD.	Pegawai mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem, yang berdampak pada tidak efektifitas dalam pengelolaan informasi daerah dan keterlambatan dalam proses administrasi

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
36.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian	ROO.25.36.28.46.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah Target tahunan pada Renstra tidak sesuai dengan RPJMD sehingga berpengaruh pada capaian tahunan
37.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang perekonomian	ROO.25.36.28.47.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
38.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.58.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang Perekonomian belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
39.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai	ROO.25.36.28.59.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai
40.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang SDA	ROO.25.36.28.62.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah
41.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA	ROO.25.36.28.63.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
42.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.64.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah
43.	Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.68.KM	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
44.	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.70	17	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
45.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.79.KM	17	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
46.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.82.KM	17	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
47.	Kebutuhan data (bid. Kewilayahan) terkait pengembangan kewilayahan terutama di sektor perhubungan, perencanaan, komunikasi dan informatika serta pengadaan barang dan jasa belum up to date sehingga perlu disinergikan	ROO.25.36.28.101.KM	17	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Data dari mitra Perangkat Daerah belum up to date	Target kinerja tidak tercapai
48.	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah bid. Kewilayahan	ROO.25.36.28.105.KM	17	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat daerah belum melaksanakan pekerjaan pada tenggat waktu tertentu (Triwulan tertentu)	hasil monitoring dan evaluasi tidak optimal
49.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.110.KM	17	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perubahan standar harga satuan	Belum konsistennya dokumen Renstra/renja dengan RKPD/RPJMD
50.	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.25.36.28.22.KM	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah
51.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid. pemerintahan yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.26.KM	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Belum sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
52.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.25.36.28.30.KM	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	Hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan
53.	Belum sinkronnya dokumen perencanaan OPD bid. Pemerintahan dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.31.KM	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional
54.	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD bid. Pembangunan manusia dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.25.36.28.35.KM	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam penyusunan Renja OPD belum mempedomani peraturan yang berlaku	Terhambatnya jadwal dan proses perencanaan pembangunan daerah
55.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid. pembangunan manusia yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.39.KM	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a						
56.	Belum maksimalnya OPD bid. pembangunan manusia dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.40.KM	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
57.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.25.36.28.42	16	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kurang koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	Kualitas pelaksanaan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum optimal
58.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO.25.36.28.55	16	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurang koordinasi dengan mitra bidang Perekonomian	Hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan
59.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO.25.36.28.71	16	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang SDA	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan
60.	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.86.KM	16	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey
61.	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJM/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.25.36.28.23.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku
62.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.24.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah
63.	Belum maksimalnya OPD bid. Pemerintahan dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.27.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJM/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai Kualitas pelaksanaan asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah belum optimal

No.	a	b	c	d	e	f	g
No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
64.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.28.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf yang tidak sesuai bidangnya	belum tersampaikan informasi ke pejabat di PD	
65.	Data bid. Pemerintahan yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.29	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapitulasi kegiatan OPD	Menghambat pelaksanaan survey	
66.	Belum maksimal program-program pemerintah pusat yang harus dijalankan di Kota Dumai	ROO.25.36.28.32.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	program Pemerintah Pusat belum tersampaikan ke Pemerintah Daerah secara maksimal	tidak terakomodirnya kegiatan Pemerintah Pusat di Kota Dumai	
67.	Adanya prioritas pembangunan bid. Pemerintahan propinsi/nasional yang berfokus di Kota Dumai yang belum terakomodir	ROO.25.36.28.33.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	Terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	
68.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.34.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pemahaman sumberdaya manusia bidang perencanaan perangkat daerah terkait penyusunan dokumen perencanaan masih rendah	dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun kurang optimal	
69.	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.25.36.28.36.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf yang tidak sesuai bidangnya	Tidak tersampaikan informasi ke pejabat di PD	
70.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.37.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappedalitbang dengan masing-masing OPD mitranya	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	
71.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.38.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	Tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	
72.	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.41	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyampaian dokumen Renja yang tidak tepat waktu	Terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku	
72.	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.41	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pada saat pembahasan dengan PD hanya dihadiri oleh staf	Belum tersampaikan informasi ke pejabat di PD	
72.	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.41	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	Menghambat pelaksanaan survey	

No.	a	b	c	d	e	f	g
	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
73.	Belum sinkronnya dokumen perencanaan OPD bid. Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.43.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia belum berpedoman pada perencanaan propinsi dan nasional	Tidak diakomodirnya usulan pemerintah Kota Dumai oleh pemerintah Propinsi/Nasional	
74.	Belum maksimal program-program pemerintah pusat yang harus dijalankan di Kota Dumai	ROO.25.36.28.44.KM	14	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	program Pemerintah Pusat belum tersampaikan ke Pemerintah Daerah secara maksimal	Terlambatnya perkembangan pembangunan di Kota Dumai	
75.	Kurang seriusnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.51.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	
76.	Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.54	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey	
77.	Proses pencairan yang lambat (bid. SDA) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.72	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	SDM yang bersangkutan lama menyerahkan berkas administrasi ke bendahara bidang	Proses pencairan yang lambat dan menumpuk	
78.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama (bid. SDA)	ROO.25.36.28.73	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Pengerjaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	Proses pengarsipan bermasalah	
79.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.80.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah	
80.	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.83.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan kemampuan SDM yang menangani perencanaan di OPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai	
81.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur	ROO.25.36.28.85	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Keterbatasan SDM dalam pemahaman proses bisnis perencanaan	Tidak optimalnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur	
82.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO.25.36.28.87.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang Infrastruktur	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan	
83.	Tidak tersedianya data (bid. Infrastruktur) pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah	ROO.25.36.28.88. KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Perangkat daerah belum melaksanakan pekerjaan pada tenggat waktu tertentu (Triwulan tertentu)	hasil monitoring dan evaluasi tidak optimal	

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
84.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.96.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan anggaran dan ketidak sesuai usulan dengan prioritas pembangunan daerah	tidak terlaksananya beberapa pembangunan sesuai usulan masyarakat yang menyebabkan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah
85.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.98.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Dalam menyusun Renja OPD masih ada yang belum berpedoman pada RKPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
86.	Kurangnya seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.99.KM	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	keterbatasan kemampuan SDM yang menangan perencanaan di OPD	Tidak sinkron antara Renja OPD dengan RKPD Kota Dumai
87.	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.103	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Sumber data yang tidak valid dan kesalahan SDM dalam merekapnya	menghambat pelaksanaan survey
88.	Waktu pelaksanaan monitoring (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.25.36.28.104	14	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	kurangnya koordinasi dengan mitra bidang pemerintahan	hasil survey yang tidak sesuai dengan yang direncanakan
89.	Adanya prioritas pembangunan bid. Pembangunan Manusia propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai yang belum terakomodir	ROO.25.36.28.45.KM	13	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kurangnya koordinasi pemerintah Kota Dumai dengan pemerintah Propinsi/Pusat	Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang disusun kurang optimal
90.	Jadwal pelaksanaan pengadaan/seleksi (bid. perekonomian) mundur	ROO.25.36.28.60	13	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Belum siap/lengkap dokumen pengadaan	Pengadaan jasa konsultasi tidak dapat dilakukan sesuai jadwal
91.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.91.KM	13	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	lemahnya koordinasi antara bidang mitra Bappeda dengan masing-masing OPD mitranya	terlambatnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) sesuai peraturan yang berlaku

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
92.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama (bid. perekonomian)	ROO.25.36.28.57	12	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Pengerjaan laporan monitoring tidak dilakukan bersama tim	Proses pengarsipan bermasalah



Drs. BUDHI HASNUJ, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002

Dumai, 20-12-2024

Pemilik Risiko :

1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003
2. INSANI TAQWA SAILI,ST
NIP.19870929 201001 1 006
3. HUMANDA DWIPA PUTRA, SH
NIP.19840419 200904 1 001

(cf)

(Hana)

(Atessa)

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko pada Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko
- Kolom f diisi dengan penyebab pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko
- Kolom g diisi dengan dampak pada Kertas Kerja Identifikasi Risiko

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kota Dumai
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dalam mempercepat kemajuan Kota Dumai
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I.	Risiko Strategis Pemda						
1.	Rendahnya kualitas dokumen perencanaan daerah	RSP.25.36.01.51	Mengadakan bimbingan teknis, dan dilkat mengenai perencanaan pembangunan daerah kepada pegawai Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan sebelum melakukan penyesuaian dokumen rencana tahunan	Terdapat Pegawai yang kurang fokus dalam menyusun dokumen perencanaan karena banyaknya beban kerja/tugas Adanya kebijakan pemerintah pusat yang baru muncul setelah melakukan penyesuaian rencana tahunan		Walikota Dumai	TW II 2025
II.	Risiko Strategis OPD						
1.	Adanya perubahan regulasi/kebijakan terhadap Penyusunan Dokumen RPJMD atau RKPD	RSO.25.36.28.01			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait yang menetapkan regulasi/kebijakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta mensosialisasikan setiap perubahan regulasi/kebijakan tersebut kepada seluruh stake holder perencanaan pembangunan daerah	Kepala Bappeda	TW I 2025
2.	Proses perencanaan pembangunan kurang berkembang	RSO.25.36.28.04			Bekerjasama dengan instansi terkait yang menbidangi inovasi (Brida) dalam mensosialisasikan tentang inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah	Kepala Bappeda	TW II - III 2025
3.	Tidak selaras antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD	RSO.25.36.28.02			Melaksanakan inventarisasi Isu strategis dan targetnya serta menyangkinkan dengan setiap Program/Kegiatan/Proyek yang terdapat pada RPJMD dan RKPD Kota Dumai yang akan/sedang di susun	Kepala Bappeda	TW I - IV 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
III.	Risiko Operasional OPD						
1.	Belum sinkronnya dokumen Rancangan Awal dengan Dokumen Rancangan Pembangunan lainnya	ROO.25.36.28.01			Melakukan Harmonisasi dan Integrasi Dokumen Ranwal dengan dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I&II 2025
2.	Data Pendukung penyusunan Rancangan Awal belum lengkap	ROO.25.36.28.02			Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan Pengumpulan Data Dukung	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
3.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.03.KM			Berkoordinasi secara intensif sejak awal perencanaan dengan pihak terkait	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
4.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.04.KM			Berkoordinasi secara intensif antar kelompok untuk memastikan adanya mekanisme yang transparan dalam proses perencanaan agar masukan dan saran yang disampaikan mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
5.	Rancangan Awal Hasil Konsultasi Publik tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.05.KM			Berkoordinasi secara intensif dengan perangkat daerah dan mitra untuk memastikan hasil konsultasi publik terakomodir oleh provinsi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
6.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.06.KM			Berkoordinasi secara intensif sejak awal perencanaan dengan pihak terkait	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
7.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.07.KM			Berkoordinasi secara intensif antar kelompok untuk memastikan adanya mekanisme yang transparan dalam proses perencanaan agar masukan dan saran yang disampaikan mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW 2025
8.	Masukan dan Saran Hasil Forum Lintas Perangkat Daerah tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.08.KM			Berkoordinasi secara intensif dengan perangkat daerah dan mitra untuk memastikan masukan dan saran hasil forum lintas perangkat daerah terakomodir oleh provinsi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW 2025
9.	Berita acara kesepakatan yang ditandatangani belum mewakili seluruh unsur pemangku kepentingan	ROO.25.36.28.09.KM			Berkoordinasi secara intensif sejak awal perencanaan dengan pihak terkait	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW 2025
10.	Masukan dan saran yang disampaikan tidak mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	ROO.25.36.28.10.KM			Berkoordinasi secara intensif antar kelompok untuk memastikan adanya mekanisme yang transparan dalam proses perencanaan agar masukan dan saran yang disampaikan mewakili seluruh komponen Kecamatan/Kelurahan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW 2025
11.	Penyempurnaan Rancangan Hasil Musrenbang tidak terakomodir oleh Provinsi	ROO.25.36.28.11.KM			Berkoordinasi secara intensif dengan perangkat daerah dan mitra untuk Penyempurnaan Rancangan Hasil Musrenbang terakomodir oleh provinsi	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW 2025
12.	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	ROO.25.36.28.12			Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama pihak provinsi dan perangkat daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW 2025
13.	Belum optimalnya penerapan perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial	ROO.25.36.28.13			Melakukan koordinasi dengan pihak terkait terutama pihak provinsi dan perangkat daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
14.	Terhambatnya perjanjian kerjasama	ROO.25.36.28.14.KM			Melakukan koordinasi dengan Bagian Kerjasama dalam rangka memanfaatkan MoU yang telah ada antara Pemko dengan pihak yang memiliki potensi, keahlian dan fasilitas	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
15.	Proses pencairan yang lambat (bid. perekonomian) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.56			Melakukan tindakan persuasif dan tunggu waktu dalam menyelesaikan berkas administrasi kegiatan monitoring	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
16.	Proses pencairan yang lambat (bid. SDA) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.69			Melakukan tindakan persuasif dan tunggu waktu dalam menyelesaikan berkas administrasi kegiatan monitoring	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
17.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. SDA) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.74.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
18.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. SDA) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.75.KM			Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Top down)	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
19.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.76.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2026

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
20.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.78.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
21.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Infrastruktur) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.90.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
22.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Infrastruktur) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.92.KM			Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Top down)	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
23.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.93.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
24.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan (bid. Kewilayahan)	ROO.25.36.28.94.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
25.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.95.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
26.	Terdapat perangkat daerah yang tidak menyampaikan data capaian pembangunan di mitra bidang kewilayahan	ROO.25.36.28.97.KM			Mengkomunikasikan kembali dampak positif pelaporan data update yang dapat membantu meningkatkan anggaran, perencanaan, atau alokasi sumber daya di wilayah tersebut.	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
27.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.107.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
28.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. Kewilayahan) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.108.KM			Komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat (Top down)	Kepala Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
29.	Interpretasi Data yang Tidak Tepat	ROO.25.36.28.15			Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dalam rangka interpretasi data yang tepat	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
30.	Ketidakakuratan Data	ROO.25.36.28.16			Melakukan sinkronisasi dengan provinsi terkait keakuratan data	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
31.	Belum efektifnya proses pengolahan data	ROO.25.36.28.17			Melakukan Pembentukan TIM analisis data dan informasi perencanaan daerah	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I 2025
32.	Belum efektifnya proses penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	ROO.25.36.28.18			Melakukan Pembentukan TIM Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I - IV 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
33.	Data yang disampaikan tidak akurat	ROO.25.36.28.19			Melakukan Asistensi dan Advokasi Penyusunan Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I - IV 2025
34.	Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak tepat waktu	ROO.25.36.28.20.KM			Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta berkoordinasi dengan provinsi agar penyampaian laporan tepat waktu	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I - IV 2025
35.	Kuranganya Keterampilan Teknis Pengguna	ROO.25.36.28.21			Melaksanakan Pelatihan Teknis Peningkatan SIPD	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	TW I - IV 2025
36.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian	ROO.25.36.28.46.KM	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Masih adanya Perangkat Daerah yang kurang mengikuti arahan hasil dari koordinasi dan koordinasi dengan Bappeda	Melakukan pendampingan secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
37.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang perekonomian	ROO.25.36.28.47.KM	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi intensif dengan perangkat daerah mitra	Masih adanya Perangkat Daerah yang kurang mengikuti arahan hasil dari koordinasi dan koordinasi dengan Bappeda	Melakukan pendampingan secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
38.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. perekonomian) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.58.KM	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi intensif dengan perangkat daerah mitra	Masih adanya Perangkat Daerah yang kurang mengikuti arahan hasil dari koordinasi dan koordinasi dengan Bappeda	Melakukan pendampingan secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
39.	Tidak adanya prioritas pembangunan (bid. perekonomian) propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai	ROO.25.36.28.59.KM	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Masih adanya Perangkat Daerah yang kurang mengikuti arahan hasil dari koordinasi dan koordinasi dengan Bappeda	Melakukan pendampingan secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
40.	Tidak sinkronnya antar Dokumen perencanaan Pembangunan bidang SDA	ROO.25.36.28.62.KM	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait data perangkat daerah mitra	Masih adanya Perangkat Daerah yang kurang mengikuti arahan hasil dari koordinasi dan koordinasi dengan Bappeda	Melakukan pendampingan secara intensif kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
41.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang SDA	ROO.25.36.28.63.KM	Bidang SDA lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Bidang mitra menjadwalkan dan menyurati dengan tegas kepada perangkat daerah mengenai pendampingan penyusunan renja per perangkat daerah	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
42.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. SDA) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.64.KM			Mengaji kesesuaian aspirasi dengan kebutuhan masyarakat bersama mitra Perangkat Daerah terkait	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
43.	Kurang seriusnya OPD (bid. SDA) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.68.KM			Subkoordinator melakukan review, revisi dan evaluasi terhadap setiap bentuk dokumen perencanaan dari mitra Perangkat Daerah	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
44.	Data (bid. SDA) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.70			Melakukan komunikasi dengan mitra Perangkat Daerah agar memberikan data aktual	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025

No.	Risiko Prioritas a b	Kode Risiko c	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada d	Celah Pengendalian e	Rencana Tindak Pengendalian f	Pemilik / Penanggung jawab g	Target Waktu Penyelesaian h
45.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RP JMD/RKPD) bidang Infrastruktur	ROO.25.36.28.79.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
46.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.82.KM			Mitra Perangkat daerah dan bidang melaksanakan upaya penyelesaian antara kegiatan prioritas kepala daerah dan dokumen perencanaan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
47.	Kebutuhan data (bid. Kewilayahan) terkait pengembangan kewilayahan terutama di sektor perhubungan, kebencanaan, komunikasi dan informatika serta pengadaan barang dan jasa belum up to date sehingga perlu disnergikan	ROO.25.36.28.101.KM			Mengkomunikasikan kembali dampak positif pelaporan data update yang dapat membantu meningkatkan anggaran, perencanaan, atau alokasi sumber daya di wilayah tersebut.	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
48.	Tidak tersedianya data pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah bid. Kewilayahan	ROO.25.36.28.105.KM			Melakukan komunikasi dengan mitra Perangkat Daerah agar memberikan data aktual	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
49.	Tidak sinkronnya dokumen perencanaan OPD (bid. Kewilayahan) dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.110.KM			Melakukan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah mitra	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
50.	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD (bid. pemerintahan) dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.25.36.28.22.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens agar dokumen perencanaan tingkat propinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD bid pemerintahan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
51.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid. pemerintahan yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.26.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens terhadap program dan kegiatan prioritas walikota dengan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
52.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Pemerintahan)	ROO.25.36.28.30.KM			melakukan koordinasi lebih optimal dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
53.	Belum sinkronnya dokumen perencanaan OPD bid. Pemerintahan dengan dokumen perencanaan Kota Dumai, Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.31.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens agar dokumen perencanaan tingkat propinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD bid pemerintahan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
54.	Belum selarasnya Dokumen Renja OPD bid. Pembangunan manusia dengan dokumen RKPD Kota Dumai	ROO.25.36.28.35.KM			Melakukan koordinasi secara intensif untuk memastikan keselarasan dokumen Renja OPD dengan dengan RKPD Kota Dumai	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
55.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah bid. pembangunan manusia yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.39.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens terhadap program dan kegiatan prioritas walikota dengan dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
56.	Belum maksimalnya OPD bid. pembangunan manusia dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.40.KM			Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
57.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. pembangunan manusia)	ROO.25.36.28.42			melakukan koordinasi lebih optimal dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
58.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. perekonomian)	ROO.25.36.28.55			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra Perangkat Daerah menyesuaikan realisasi pembangunan dengan jadwal monitoring bidang	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
59.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. SDA)	ROO.25.36.28.71			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra Perangkat Daerah menyesuaikan realisasi pembangunan dengan jadwal monitoring bidang	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
60.	Data (bid. Infrastruktur) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.86.KM			Melakukan komunikasi dengan mitra Perangkat Daerah agar memberikan data aktual	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
61.	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Pemerintahan	ROO.25.36.28.23.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens antara dokumen RPJPD, RPJM dan RKPD dengan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
62.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.24.KM			Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak pihak yang terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
63.	Belum maksimalnya OPD bid. Pemerintahan dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.27.KM			Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
64.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.28.KM	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Masih adanya hasil pembahasan dan berita acara pembahasan yang belum sampai kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
65.	Data bid. Pemerintahan yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.29			Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
66.	Belum maksimal program-program pemerintah pusat yang harus dijalankan di Kota Dumai	ROO.25.36.28.32.KM			Melakukan koodinasi lebih intensif terkait program pemerintah pusat di Kota Dumai dengan OPD bidang Pemerintahan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
67.	Adanya prioritas pembangunan bid. Pemerintahan propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai yang belum terakomodir	ROO.25.36.28.33.KM			Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait program/kegiatan prioritas propinsi dan nasional bidang Pemerintahan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
68.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.34.KM	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Masih adanya hasil pembahasan dan berita acara pembahasan yang belum sampai kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Bidang mitra menyampaikan Laporan hasil pembahasan dan berita acara di secara langsung kepada kepala perangkat daerah melalui surat atau pesan pribadi (Whatsapp/email)	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
69.	Belum maksimalnya koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidano Pembangunan manusia	ROO.25.36.28.36.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens antara dokumen RPJPD, RPJM dan RKPD dengan dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
70.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. pemerintahan) yang belum terakomodir dalam Renia OPD	ROO.25.36.28.37.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens terhadap program dan kegiatan prioritas walikota dengan dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
71.	Hasil Evaluasi/rekomendasi tidak ditindaklanjuti	ROO.25.36.28.38.KM	Menyampaikan hasil pembahasan dan berita acara pembahasan kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Masih adanya hasil pembahasan dan berita acara pembahasan yang belum sampai kepada kepala perangkat daerah atau pejabat terkait	Bidang mitra menyampaikan Laporan hasil pembahasan dan berita acara di secara langsung kepada kepala perangkat daerah melalui surat atau pesan pribadi (Whatsapp/email)	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
72.	Data (bid. pembangunan manusia) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.41			Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
73.	Belum sinkronnya dokumen perencanaan OPD bid. Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan Kota Dumai. Propinsi dan Nasional	ROO.25.36.28.43.KM			Melakukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens agar dokumen perencanaan tingkat propinsi, nasional dan kota dengan dokumen perencanaan OPD bid pembangunan manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
74.	Belum maksimal program-program pemerintah pusat yang harus dijalankan di Kota Dumai	ROO.25.36.28.44.KM			Melakukan koodinasi lebih intensif terkait program pemerintah pusat di Kota Dumai dengan OPD bidang Pembangunan manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025
75.	Kurang seriusnya OPD (bid. perekonomian) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.51.KM			Subkoordinator melakukan review, revisi dan evaluasi terhadap setiap bentuk dokumen perencanaan dari mitra Perangkat Daerah	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
76.	Data (bid. perekonomian) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey.	ROO.25.36.28.54			Melakukan komunikasi dengan mitra Perangkat Daerah agar memberikan data aktual	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
77.	Proses pencairan yang lambat (bid. SDA) diakibatkan tidak lengkapnya berkas administrasi	ROO.25.36.28.72			Melakukan tindakan persuasif dan tenggat waktu dalam menyelesaikan berkas administrasi kegiatan monitoring	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
78.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama (bid. SDA)	ROO.25.36.28.73			Melakukan tindakan persuasif dan tenggat waktu dalam menyelesaikan berkas administrasi kegiatan monitoring	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
79.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Infrastruktur) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.80.KM			Mengaji kesesuaian aspirasi dengan kebutuhan masyarakat bersama mitra Perangkat Daerah terkait	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
80.	Kurang seriusnya OPD (bid. Infrastruktur) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.83.KM			Subkoordinator melakukan review, revisi dan evaluasi terhadap setiap bentuk dokumen perencanaan dari mitra Perangkat Daerah	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
81.	Belum maksimalnya kegiatan asistensi terhadap Perangkat Daerah mitra bidang infrastruktur	ROO.25.36.28.85			Subkoordinator melakukan review, revisi dan evaluasi terhadap setiap bentuk dokumen perencanaan dari mitra Perangkat Daerah	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
82.	Waktu pelaksanaan monitoring yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Infrastruktur)	ROO.25.36.28.87.KM			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra Perangkat Daerah menyesuaikan realisasi pembangunan dengan jadwal monitoring bidang	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
83.	Tidak tersedianya data (bid. Infrastruktur) pelaksanaan pekerjaan oleh perangkat daerah	ROO.25.36.28.88.KM			Melakukan komunikasi dengan mitra Perangkat Daerah agar memberikan data aktual	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
84.	Adanya aspirasi masyarakat dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.96.KM			Mengaji kesesuaian aspirasi dengan kebutuhan masyarakat bersama mitra Perangkat Daerah terkait	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
85.	Adanya program dan kegiatan prioritas kepala daerah (bid. Kewilayahan) yang belum terakomodir dalam Renja OPD	ROO.25.36.28.98.KM			Mengaji kesesuaian aspirasi dengan kebutuhan masyarakat bersama mitra Perangkat Daerah terkait	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025

No.	Risiko Prioritas b	Kode Risiko c	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada d	Celah Pengendalian e	Rencana Tindak Pengendalian f	Pemilik / Penanggung jawab g	Target Waktu Penyelesaian h
86.	Kurang seriusnya OPD (bid. Kewilayahan) dalam melakukan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	ROO.25.36.28.99.KM			Subkoordinator melakukan review, revisi dan evaluasi terhadap setiap bentuk dokumen perencanaan dari mitra Perangkat Daerah	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
87.	Data (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai/akurat dengan kondisi di lapangan pada saat survey;	ROO.25.36.28.103			Melakukan komunikasi dengan mitra Perangkat Daerah agar memberikan data aktual	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
88.	Waktu pelaksanaan monitoring (bid. Kewilayahan) yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pembangunan di OPD (bid. Kewilayahan)	ROO.25.36.28.104			Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan mitra Perangkat Daerah menyesuaikan realisasi pembangunan dengan jadwal monitoring bidang	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
89.	Adanya prioritas pembangunan bid. Pembangunan Manusia propinsi/nasional yang berlokasi di Kota Dumai yang belum terakomodir	ROO.25.36.28.45.KM			Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait program/kegiatan prioritas propinsi dan nasional bidang Pembangunan manusia	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	TW I, TW II, TW III 2025

No.	Risiko Prioritas b	Kode Risiko c	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada d	Celah Pengendalian e	Rencana Tindak Pengendalian f	Pemilik / Penanggung Jawab g	Target Waktu Penyelesaian h
90.	Jadwal pelaksanaan pengadaan/seleksi (bid. perekonomian) mundur	ROO.25.36.28.60			Menyiapkan dokumen pengadaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW II 2025
91.	Tidak terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) bidang Kewilayahan	ROO.25.36.28.91.KM	Bidang Infrastruktur lebih intens untuk mendampingi OPD mitranya dalam menyusun renja	Masih adanya Perangkat Daerah yang tidak melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Bidang mitra meniadwalkan dan menyurati dengan tegas kepada perangkat daerah mengenai pendampingan penyusunan renja per perangkat daerah	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025
92.	Penyelesaian laporan monitoring yang lama (bid. perekonomian)	ROO.25.36.28.57			Melakukan tindakan persuasif dan menetapkan tenggat waktu dalam menyelesaikan berkas administrasi kegiatan monitoring	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	TW IV 2025

Dumai, 20-12-2024

Pemilik Risiko :

1. ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si
NIP.19770405 200112 2 003

2. INSANI TAQWA SAILI, ST
NIP.19870929 201001 1 006

3. HUMANDA DWIPA PUTRA, SH

(g)

()

()

Mengetahui,
Kepala Bappeda,



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
NIP.19740213 199303 1 002

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi.

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP